

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA**

(studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)

Moch Yusuf Syaifudin

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

moch.17040674085@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat menjadi satu pilihan pemerintah desa guna menghadapi permasalahan yang ada di desa. Baik itu permasalahan ekonomi, sosial, maupun budaya, pemberdayaan masyarakat merupakan cara untuk menemukan jalan keluar terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait peran Pemerintah Desa Jurug dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata Jurug. Program desa wisata berguna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Jurug untuk bisa menarik wisatawan baik dalam atau luar desa. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus penelitian peran Pemerintah Desa Jurug, teknik analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian didasarkan indikator yang dirumuskan oleh Sahyana (2019:159-160), Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program, Peran pemerintah desa sebagai Pembina. Peran Pemerintah Desa Jurug merumuskan kebijakan terkait pengembangan desa wisata sudah baik, namun pada pelaksanaan program dan pembinaan, Pemerintah Desa Jurug masih kurang. Masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya tindak lanjut sosialisasi, kurangnya partisipasi masyarakat, alokasi dana, dan permasalahan terkait limbah kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa Jurug sudah melakukan pembinaan dibidang ekonomi, kepemudaan dan keagamaan. Namun pembinaan di bidang kepemudaan dan keagamaan masih belum maksimal dimana belum adanya sebuah kelembagaan kepemudaan sebagai wadah pemuda untuk bisa berpartisipasi dalam program yang dijalankan. Pemerintah desa harus menguatkan peran terkait pengimplementasian kebijakan dan mencari solusi terkait dengan penghambat dari berjalannya program desa wisata dan memberi fasilitas pada bidang kepemudaan dan keagamaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Desa Wisata

Abstract

Community empowerment is an option government done way to deal with problems that exist in the village. Be it economic, social, or cultural issues, community empowerment is a way to find solutions to these problems. This study aims to analyze the role of the Jurug Village Government in community development and empowerment through the Jurug tourism village program. The tourism village program is useful for developing the potential of Jurug Village to be able to attract tourists both inside and outside the village. Researchers used descriptive qualitative research, with a focus on research on the role of the Jurug Village Government, data analysis technique uses an interactive model consisting of data collection, data reduction, and data presentation. Results research is based on indicators formulated by Sahyana (2019:159-160), The role of the village government as a policy implementer, The role of the village government as a program implementer, The role of the village government as a coach. The role of the Jurug Village Government in formulating policies related to the development of tourist villages is good, but in the implementation of the program and guidance, the Jurug Village Government is still lacking. There are still inhibiting factors in implementing the program, including: lack of follow-up to socialization, lack of community participation, allocation of funds, and problems related to animal waste that pollutes river flows. The village government of Jurug has provided guidance in the fields of economy, youth and religion. However, coaching in the field of youth and religion is still not optimal where there is no youth institution as a forum for youth to be able to participate in the program being run.

Keywords: Community Empowerment, Village Government, Tourism Village

PENDAHULUAN

Wilayah pedesaan adalah salah satu komponen yang perlu dikembangkan dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana merujuk pada tulisan Ulumiyah dkk (2013:89) sebagaimana disebutkan bahwa pembangunan wilayah pedesaan mempunyai tujuan agar wilayahnya bisa menjadi sebuah wilayah yang sejahtera dan mandiri. Peningkatan kualitas mutu hidup masyarakatnya juga menjadi sebuah hal yang penting dalam menciptakan sebuah wilayah yang mandiri dan mempunyai taraf hidup yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa, desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwasanya pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan terendah dan mempunyai andil dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa juga merupakan elemen pemerintahan yang menunjang pembangunan Nasional dan juga kemajuan Negara Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut tentunya perlu adanya peningkatan kemampuan penyelenggaraan desa atau pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Merujuk pada penelitian Walidaya (2013:2) menyebutkan bahwa, pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwasanya prinsip tersebut terkait dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, peran serta masyarakat, dan juga memperhatikan keanekaragaman yang ada di daerah seperti yang disebutkan dalam tulisan Ulumiyah (2013:890). Adanya wewenang tersebut maka pemerintah desa melakukan suatu pengelolaan terhadap desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Adapun pengelolaan desa bisa berupa, pemberdayaan masyarakatnya dan juga pembangunan desa dengan menggali potensi sumber

daya alam sebagai kearifan lokal yang ada dalam suatu daerah. Pembangunan desa bertujuan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Berdasarkan tulisan Sahyana (2019:157), Pemberdayaan masyarakat sendiri bertujuan untuk peningkatan SDM terutama untuk mengubah perilaku masyarakat dengan taraf hidup yang lebih berkualitas. SDM yang berkualitas tentunya akan membuat suatu desa bisa lebih mengembangkan potensi yang ada dalam desa tersebut. Seiring berkembangnya zaman tentunya keahlian dari SDM dalam mengelola suatu desa merupakan faktor terpenting dalam suatu pembangunan. Mengingat desa mempunyai keberagaman potensi yang dimiliki, tentunya kesadaran pada masyarakat perlu dikembangkan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melihat, peluang yang ada didesa berupa potensi alam perlu dikembangkan. Dalam hal ini peranan pemerintah desa untuk meningkatkan tarap kesadaran masyarakat dan meningkatkan potensi alam sangat perlu dilaksanakan, melihat ada beberapa faktor yang sangat berpeluang dalam sektor pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berdasarkan tulisan Ahkam (2018:45).

Merujuk pada penelitian Oroh (2014:2) peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat tentunya merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Dengan begitu maka pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mampu menjadikan masyarakat mampu berperan aktif dalam melakukan pembangunan yang ada di desa. perbaikan pada peran pemerintah desa juga merupakan suatu hal yang perlu untuk di prioritaskan. Meneurut penelitian Nugroho (2021:161) menyatakan bahwa ada tiga hal yang mutlak menerima perhatian serius yaitu, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, mekanisme serta metode kerja. Pemerintah desa harus bisa memperbaiki sistem dan inovasi dalam birokrasi di desa. dengan begitu pemerintah desa memeberikan inovasi-inovasi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya melalui program desa wisata. Mengingat tidak hanya peran dari pemerintah desa saja masyarakat juga mempunyai peran penting dalam

menyukseskan program yang dijalankan. Pemerintah desa harus mempunyai strategi khusus untuk menarik minat masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam program yang diimplementasikan. Khususnya dalam pengembangan program desa wisata, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam mensukseskan program tersebut. Kesuksesan suatu program pemerintah desa akan tepat sasaran apabila program tersebut sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dengan melakukan pembangunan terhadap sektor wisata yang ada dalam desa tersebut, maka daerah tersebut akan bisa berkembang dan juga mempunyai daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut dan tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan tulisan dari Laloma (2012:2) menyebutkan bahwa Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka pembangunan desa, seperti dalam memberikan keterangan atau penjelasan kepada warga desa tentang program yang akan dilaksanakan, memberi persuasi atau ajakan dan dorongan kepada warga desa untuk ikut serta berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Pengoptimalan peran dari pemerintah desa menentukan keberhasilan suatu program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Penguatan peran dari pemerintah desa membuat masyarakat lebih aktif ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut Soekanto (2003:65) dalam Rumulus dkk (2013:3), peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan satu peran. Peran itu sendiri merupakan sebuah tanggung jawab seseorang yang mempunyai kedudukan untuk melaksanakan sebuah tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya. Peran pemerintah juga bisa dikatakan sebagai harapan individu maupun kelompok terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan social. Peran pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pemerintahan harus memiliki

tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan harus mempunyai sebuah pemikiran yang inovatif dan rasional, sehingga bisa menjalankan sebuah sistem pemerintahan yang bagus. Sebuah sistem pemerintahan yang bagus tentunya tidak terlepas dari adanya SDM yang memadai. Pemerintah desa juga memiliki tugas sebagai pengawas terhadap program-program maupun kebijakan yang dibuat.

Menurut Sahyana (2019:159-160)

bahwasanya peran pemerintah desa meliputi 3 variabel

- (1) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan.
- (2) Peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan program.
- (3) Peran pemerintah desa sebagai pembina.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana dijelaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat, partisipasi, dan pemberdayaan menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan otonomi desa (penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dalam undang – undang tersebut Pemerintah Desa mempunyai peranan yang penting untuk menggali aset-aset, potensi-potensi yang ada di desa demi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang disebutkan dalam penelitian Karbulah, dkk (2018:93). Peranan dari pemerintah untuk melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan adanya program-program desa merupakan hal yang dapat menjadikan suatu program desa mampu berjalan dengan baik. Selain itu pengelolaan terhadap SDA dan juga pemberdayaan terhadap masyarakat yang baik merupakan langkah awal keberhasilan sebuah program. Pemerintah desa juga harus mempertimbangkan adanya faktor-faktor penunjang maupun penghambat yang dapat mempengaruhi berjalannya sebuah program.

Menurut Sumaryadi (2005: 114) dalam Hidayah (2017:5), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang; b) memperkuat daya potensi yang

dimiliki dengan langkah-langkah positif memperkembangkannya; c) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang-peluang. Upaya-upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, serta fasilitas-fasilitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut bisa dikatakan bahwasannya pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah usaha pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Payne (1997 : 266) dalam Sugiri (2012:58) mengemukakan bahwa proses Pemberdayaan ditujukan : untuk membantu klien memperoleh daya atas keputusan dan tindakan yang terkait dengan diri mereka, dengan mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial untuk melatih daya yang ada, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya dan melalui transfer daya dari lingkungannya). Dalam konteks diatas bisa disimpulkan bahwasannya yang dimaksud klien disini adalah individu atau kelompok. Maka dengan adanya proses pemberdayaan bisa menjadikan individu atau kelompok tersebut meningkatkan kualitasnya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Rusmiyati (2011: 16) dalam Sabtimarlina (2019:12) , pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya, atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang memengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan adalah sebuah usaha untuk meningkatkan sebuah kemampuan yang dimiliki untuk menjadikannya sebuah kekuatan. Hal tersebut menandakan bahwasannya kekuatan tersebut bisa menjadikan individu atau kelompok bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam lingkungan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang di harapkan. Mengenai sistem pemerintahan, peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah penting dimana hal tersebut menjadikan sebuah daerah akan bisa menjadi daerah yang mandiri. Proses pemberdayaan membuat masyarakat akan lebih percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam lingkungan. Menurut Sumaryadi (2005:25) dalam Putra dkk (2012:1205) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral

dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata tidak akan berhasil apabila masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan hal ini berdasarkan tulisan Kurnia (2017:3). Karena masyarakat sendiri merupakan faktor yang sangat mempengaruhi berjalan atau tidak nya program desa wisata. Jika hanya program saja yang dikeluarkan oleh pemerintah desa namun masyarakat tidak ikut serta berperan aktif dalam pembangunan desa, maka program tersebut tidak akan bisa berjalan secara efektif. Harus ada sinergi antara pemerintah desa dan juga masyarakat dalam menjalankan suatu program, agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mengacu pada penelitian Rindi (2016:2) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan adanya pemberdayaan tersebut masyarakat harus berperan aktif guna memperbaiki taraf hidup yang lebih berkualitas. Berjalannya suatu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan maka, akan mengurangi jumlah masyarakat kurang mampu dan terbelakang dalam suatu desa. Permasalahan yang ada di desa cukup kompleks, seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan di desa yang cenderung rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut tentunya pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjang kualitas SDM yang ada di desa. Berdasarkan penelitian Trisna dkk (2019:40) menyebutkan bahwa proses pemberdayaan bisa masyarakat akan meningkatkan kapasitas pribadi maupun kelompok melalui program desa wisata dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan. Program desa wisata tersebut mempunyai tujuan sebagai suatu program yang bisa memperbaiki taraf kehidupan masyarakat dan juga memperkenalkan desa dengan kharakteristiknya agar bisa dikenal oleh wisatawan baik lokal maupun luar desa.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jurug tidak hanya pada program desa wisatanya saja. Pemerintah Desa Jurug juga melakukan pemberdayaan di bidang PKK dan juga Pemuda.

Pemberdayaan yang dilakukan terkait dengan pengembangan skill pemuda Desa Jurug dengan memberikan pelatihan las dan elektro. Pemerintah desa bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ponorogo untuk memberikan pelatihan yang bertujuan untuk menambah skill dari pemuda di Desa Jurug. Pemberdayaan pada Ibu-ibu PKK adalah dengan memberi kan penyuluhan terkait olahan wedang aserehe dan berbagai macam jajanan khas desa jurug seperti: roti jahe, dan olahan keripik. Bekerja sama dengan dinas pertanian pemerintah desa melakukan penyuluhan terkait pemasaran dari produk yang ada di Desa Jurug dengan tujuan mampu memasarkan produknya sampai keluar Kabupaten Ponorogo.

Kekayaan alam dan keberagaman bangsa Indonesia menyimpan banyak potensi sekaligus peluang berharga untuk membangun kepariwisataan Indonesia agar lebih bergairah di mata dunia serta memiliki karakteristik berdasarkan kearifan lokal. Adanya keberagaman potensi yang ada dalam setiap daerah, tentunya merupakan suatu asset yang sangat menguntungkan bagi daerah. Potensi tersebut tentunya harus dikelola dengan baik agar pengembangan dalam daerah bisa lebih maksimal, Mengingat kekayaan alam yang didesa bisa menjadi sumber Sektor pariwisata yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk Produk Domestik Bruto (PDB) nasional seperti dalam penelitian hal ini berdasarkan tulisan dari Hidayah (2017:2). Tentunya dalam pengelolaan pada Sektor pariwisata dalam desa juga harus melibatkan seluruh elemen dalam desa, dengan melibatkan keseluruhan elemen yang ada tentunya akan mempermudah dalam melakukan pengelolaan pariwisata. Banyaknya wisatawan pada masa sekarang yang lebih tertarik terhadap wisata alam yang ada didesa memungkinkan suatu desa membentuk sebuah program Desa Wisata. Dengan adanya program tersebut tentunya akan mengangkat wisata alam yang ada di dalam desa untuk bisa dinikmati oleh banyak khalayak masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang ada di dalam desa tetapi juga wisatawan dari luar desa bahkan luar kota.

Definisi dari desa wisata sendiri menurut UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah suatu daerah tujuan wisata atau destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang disajikan dalam suatu stuktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku seperti dalam penelitian Pratiwi (2017:8). Desa wisata menawarkan kegiatan-kegiatan kepariwisataan sebagai

daya tarik terhadap wisatawan yang akan berkunjung kesebuah Desa yang mempunyai daya Tarik wisata. Sedangkan desa wisata menurut Fandeli (2012:171) dalam Masitah (2019:49) secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.

Desa wisata bisa dikatakan sebagai sebuah karakteristik sebuah desa yang merupakan potensi asli yang dimiliki sebuah desa. Potensi tersebut bisa berupa kekayaan alam, maupun kondisi social dan budaya. Keragaman tersebut tentunya merupakan sesuatu yang belum tentu dimiliki desa lain sehingga menjadikan sebuah Desa mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan adanya sebuah keunikan potensi tersebut maka Pemerintah Desa tersebut menggunakan potensi tersebut menjadi sebuah karakteristik sebuah Desa yang mampu meningkatkan kualitas Desa tersebut di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Desa Jurug yang mempunyai sebuah karakteristik dalam bidang kepariwisataan juga merupakan salah satu Desa Wisata di Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Desa Jurug menjadikan desa tersebut menjadi Desa Wisata dikarenakan banyak potensi alam yang tentunya mempunyai daya tarik tersendiri untuk membuat wisatawan datang untuk menikmati kekayaan alam yang ada di Desa Jurug. Tidak hanya kekayaan alamnya saja Desa Jurug juga mempunyai keberagaman budaya yang masih tetap terjaga yang membuat Desa Jurug menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung. Dengan adanya program desa wisata tentunya akan menggali potensi dalam desa yang masih belum diperhatikan untuk bisa menjadi sebuah rangsangan terhadap pembangunan infrastruktur desa.

Permasalahan terkait dengan pembangunan yang ada di desa dan pengelolaan di sektor pariwisata di Desa Jurug adalah kurangnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya untuk ikut serta dalam mensukseskan program dari pemerintah. Berdasarkan penelitian Rois dkk (2019:1140) mengenai syarat pembangunan destinasi wisata, antara lain: (a) adanya calon destinasi wisata yang memiliki

potensi, (b) kerja sama yang baik semua lini, (c) sarana dan prasarana, (d) akses jalan yang baik, dan (e) alokasi dana yang mencukupi. Pemerintah Desa Jurug masih belum melakukan pemberdayaan masyarakat secara maksimal dalam menjalankan program desa wisata, pemerintah desa belum bisa berkerja sama dengan baik dengan Lembaga terkait seperti Pokdarwis dan seluruh elemen masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada di kawasan wisata Desa Jurug juga masih kurang dalam pembangunannya. Selain itu akses untuk menuju kawasan pariwisata Air Terjun Pletuk juga sudah mulai rusak dan tidak terawat dan juga sehingga menyebabkan para wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi wisata akan mengalami kesulitan. Hal itu disebabkan karena kawasan wisata Air Terjun Pletuk sudah lama tidak beroperasi. Pemerintah desa harus segera melakukan perawatan dan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan desa wisata di Desa Jurug. Perbaikan akses menuju lokasi wisata perlu diperhatikan karena merupakan suatu faktor penting agar memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata tersebut.



Gambar 1. Akses menuju destinasi Wisata Desa Jurug

Sumber : Dokumentasi pribadi narasumber

Pemerintah Desa cenderung hanya membuat program tanpa melakukan sosialisasi secara maksimal terkait program tersebut kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih tidak peduli terhadap program desa wisata yang dijalankan. Selain kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, masyarakat desa cenderung lebih pasif dalam partisipasi terhadap program-program Pemerintah Desa. Sehingga maka dari itu pemerintah desa harus mempunyai langkah strategis untuk memberdayakan masyarakatnya sehingga bisa membuat program Desa berjalan sebagaimana mestinya. Langkah strategis yang digagas oleh pemerintah desa terkait pengembangan desa dengan memberikan rangsangan positif terhadap

masyarakat untuk bisa bersinergi dengan Pemerintahan Desa dalam pengembangan Desa Wisata dengan memperhatikan SDA, SDM, dan juga Aspek Kultural yang ada dalam suatu wilayah tersebut. Dengan mengoptimalkan terhadap pemberdayaan SDM yang ada guna mengelola SDA yang merupakan faktor terpenting yang ada dalam pembangunan di Sektor pariwisata yang akan dikembangkan. Selain itu aspek kultural juga bisa menjadikan daya tarik tersendiri terhadap wisatawan yang akan berkunjung ke tempat wisata. Pemerintah harus berperan aktif dalam pemberdayaan SDM yang ada di desa untuk, bisa membuat suatu program-program yang efektif dan juga strategis untuk di jalankan dalam desa tersebut.

Desa wisata yang merupakan program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengenalkan suatu karakteristik khusus yang dimiliki suatu desa. Karakteristik yang dimiliki pada desa wisata adalah sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal mengacu pada penelitian Masitah (2019:46). Karakteristik khusus tersebut merupakan identitas yang dimiliki suatu desa. Dengan adanya identitas khusus tersebut maka Pemerintah Desa menggunakannya sebagai daya tarik agar para wisatawan bisa menikmati program desa wisata yang diimplementasikan oleh pemerintah desa. Dengan adanya karakteristik yang ada di suatu daerah tersebut akan membuat wisatawan tertarik dengan keunikan yang ada di daerah tersebut. Sektor pariwisata bisa menjadi salah satu sumber perekonomian bagi desa dan juga bisa sebagai sarana pemeliharaan terhadap kekayaan alam yang ada di desa tersebut dengan pengelolaan yang baik.

Peneliti mengambil permasalahan yang terjadi masyarakat Desa Jurug yaitu kurangnya peran pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi terhadap program-program yang dibuat oleh pemerintah desa. Peneliti memilih Desa Jurug sebagai lokasi penelitian dikarenakan sebelumnya peneliti sudah melakukan pra *research* di Desa Jurug sehingga mendapatkan data-data yang peneliti butuhkan untuk bisa menjawab rumusan permasalahan yang diambil peneliti agar tujuan penelitian bisa tercapai. Berknaan dengan penelitian ini peran pemerintah desa sebagai focus penelitian, bisa dikatakan peran itu sendiri bermaksud sebagai harapan dari masyarakat kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kurangnya sosialisai program dan juga ajakan

persuasif terhadap semua lapisan masyarakat pemerintah desa juga belum bisa mengoptimalkan Lembaga terkait dengan adanya program desa wisata seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).

Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat terkait program Desa Wisata Yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo masih belum bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Desa masih belum bisa membuat masyarakat Desa Jurug sadar akan potensi alam yang dimilikinya. Pemerintah desa harus melakukan sebuah strategi agar masyarakat mengetahui program tersebut sekaligus tertarik untuk berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut, dan ikut serta mengelola Air Terjun Pletuk bersama dengan pemerintah desa setempat. Masyarakat Desa Jurug dan pemerintah desa masih belum bisa bersinergi dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam yang ada di desa tersebut. Tidak hanya Air Terjun, di tempat sekitar wisata tersebut masih banyak potensi alam yang lain. Diantaranya adalah, sungai yang mengalir dapat dijadikan wisata rafting, dan juga terdapat potensi outbond di sekitarnya. Selain itu, di Desa Jurug juga terdapat calon destinasi lain yang apabila dikembangkan dan diintegrasikan dengan Air Terjun Pletuk dapat menarik wisatawan.

Untuk itu, Pemerintah Desa Jurug sebagai pemangku kebijakan harus serius dan berani mengalokasikan dana untuk mengembangkan Air Terjun Pletuk. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Desa Jurug melalui Bapak Kepala Desa memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di Desa Jurug, khususnya wisata Air Terjun Pletuk. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut maka Pemerintah Desa Jurug melakukan program desa wisata guna mengembangkan potensi yang ada di Desa Jurug tersebut.

Peneliti mengambil judul tersebut dengan harapan, Pemerintah Desa bisa melakukan terobosan atau strategi khusus dalam memberdayakan masyarakat desa. Mengingat masyarakat desa memiliki karakteristik yang cenderung pasif berpartisipasi dalam pembangunan maupun program-program desa. Pemerintah Desa Jurug diharapkan bisa melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya dengan efektif dan juga melakukan penyuluhan terkait program tersebut, guna menjadikan masyarakat lebih tertarik dan mau berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata sehingga menjadikan wisata alam yang ada di

desa bisa menjadi potensi destinasi wisata yang diminati banyak wisatawan. Berdasarkan serangkaian permasalahan tersebut maka penting dalam melakukan pengkajian dan pendeskripsian terkait Peran Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo. Adapun sebuah permasalahan tersebut dikaji berdasarkan variabel yang dirumuskan oleh Menurut Sahyana (2019:159-160) yakni:

- (1) Peran Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Kebijakan.
- (2) Peran Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Program.
- (3) Peran Pemerintah Desa sebagai Pembina.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program desa wisata di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Menurut Koentjoroningrat (1990:20) dalam Sahyana (2019:159), bahwa penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah desa, bisa dikatakan peran itu sendiri bermaksud sebagai harapan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fokus pada penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana dirumuskan oleh Sahyana (2019:159-160)

- (1) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan.
- (2) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program.
- (3) Peran pemerintah desa sebagai pembina.

Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman. Menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan seperti dalam penelitian Madina dkk (2015:5). Teknik analisis tersebut digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi secara faktual terkait dengan penelitian yang sedang dijalankan. Pengumpulan data

penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti adalah melihat potensi yang dimiliki oleh Desa Jurug seperti lokasi wisata alam, kuliner dan budaya di Desa Jurug. Selain itu peneliti juga melakukan observasi terkait dengan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Desa Jurug dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo terkait penyuluhan dan pembentukan lembaga yang bergerak di sector pariwisata. Wawancara dilakukan dengan kepala desa, lembaga terkait antara lain ketua pokdarwis dan LPMD dan inisial T sebagai sampel masyarakat Desa Jurug. Adapun sumber data berasal dari data primer dan sekunder:

- a) Primer
Peneliti mendapatkan sebuah data atau dokumen dari hasil wawancara dengan Pemerintah Desa, Lembaga terkait sekaligus masyarakat Desa Jurug.
- b) Sekunder
Peneliti mendapatkan sumber dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat terkait dengan program desa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Kebijakan

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur kepentingan publik, sebagaimana dalam penelitian Bakry (2010:2). Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana kebijakan untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang akan di pilih berdasarkan permasalahan yang ada di desa. Sebagai pelaksana kebijakan artinya pemerintah desa mempunyai tanggung jawab atas kebijakan yang sudah ditetapkan dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada di desa. Berdasarkan penelitian terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, tentunya Pemerintahan desa, kepala desa dan lembaga-lembaga seperti LPMD, dan juga Pokdarwis (Kelompok Sadar Wiasata) mempunyai tugas untuk menentukan sebuah kebijakan terkait dengan program desa wisata di Desa Jurug. Peran dari pemerintah desa itu sendiri dinilai dapat untuk meningkatkan kinerja organisasi dan juga pelayanan terhadap masyarakat khususnya pada desa. Pemerintah dan lembaga terkait bekerjasama untuk menentukan sebuah program untuk menjadikan sebuah masyarakat yang bermutu dan mandiri. Penentuan pokok-pokok pemikiran yang di tuangkan dalam program yang akan

direalisasikan tentunya mempunyai sasaran terhadap program yang dijalankan.

Kerjasama antara Pemerintah Desa Jurug dan lembaga terkait dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui program desa wisata. Adapun kebijakan Pemerintah Desa Jurug dan juga lembaga terkait adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan setiap daerah di Desa Jurug.
- b) Menjalin Kerjasama dengan kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan membentuk lembaga yang bergerak di bidang Pariwisata (Jurug Kelana Dewi)
- c) Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana akses menuju lokasi wisata.
- d) Peningkatan ekonomi produktif sebagai branding desa wisata.

Penyusunan kebijakan terkait dengan program desa wisata di Desa Jurug dilatarbelakangi oleh vakumnya lokasi wisata yang menjadi kekayaan alam di Desa Jurug. Tentunya dalam perumusan kebijakan melibatkan tidak hanya dari pemerintah desa dan lembaga terkait melainkan dari masyarakat sebagai sasaran dari Program tersebut. Berkaitan dengan adanya kasus ini masyarakat Desa Jurug yang seharusnya aktif dalam penyusunan rumusan-rumusan kebijakan dari program desa wisata, namun berdasarkan hasil observasi di lapangan ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Desa Jurug. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Jurug, T menyebutkan bahwa dalam proses sosialisasi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jurug dikarenakan banyak dari masyarakat desa yang pasif terhadap program dari Pemerintah Desa Jurug. Pernyataan tersebut bisa dilihat dari kurangnya minat dari masyarakat untuk ikut serta mengembangkan potensi yang ada di Desa Jurug.

2. Peran Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Program.

Program menurut Charles O. Jones (1996:294) dalam penelitian Shalfiah (2013:978), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Pemerintah desa sebagai pelaksana program tentunya membuat program-program yang bisa mengatasi permasalahan social yang ada dalam lingkup pemerintahannya. Sebagai pelaksana program pemerintah desa melakukan musyawarah dengan

masyarakat di mulai dari tingkat dusun. setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat desa yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dimulai dari RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga terkait dan juga pemerintah desa. Hal itu bertujuan untuk membahas usulan kegiatan yang akan direncanakan sebelum menentukan program-program yang akan dijalankan terkait dengan program desa wisata Desa Jurug. Pengembangan konsep pemberdayaan yang dijalankan ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Ulumiyah (2013:893) yang mana menyebutkan bahwa pemberdayaan mengacu pada poin pertama yaitu bottom up approach. Pendekatan tersebut adalah pendekatan yang dilakukan dari lapisan desa terbawah yang bertujuan agar masyarakat Desa Jurug bisa terlibat dan menyampaikan gagasan-gagasan dalam pelaksanaan program desa wisata. Sehingga masyarakat bisa mengendalikan Program yang dijalankan oleh desa. peran pemerintah disini untuk menjalankan program yang merupakan gagasan dari masyarakat desa dan kemudian mengevaluasi dan memonitor hasil kegiatan pelaksanaan program desa wisata di lapangan. Adapun program desa wisata Desa Jurug periode 2019-2025 yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pembangunan tiap daerah di Desa Jurug
- b) Kerjasama dengan kampus Universitas Muhammadiyah antara lain
 1. Membentuk Lembaga yang bergerak di bidang pariwisata
 2. Melakukan seminar terkait agrowisata
 3. Pengembangan SDM dalam mendukung Desa Wisata dengan pelatihan dan seminar.
- c) Peningkatan Ekonomi Produktif sebagai Branding Desa Wisata.

Proses pelaksanaan program desa wisata tersebut tentunya tidak lepas dari adanya kerja sama antara pemerintah desa dan juga seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tentunya diukur dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan sebuah program yang dijalankan. Adanya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat yang baik tentunya akan menjadi sebuah faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu program. Pelaksanaan Program tersebut tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program desa wisata. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka pemerintah desa harus mempunyai strategi untuk mencari jalan keluar untuk mencapai keberhasilan program. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat peran dari

Pemerintah Desa Jurug dalam pelaksanaan program desa wisata di Desa Jurug adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung:

1. Menjalin kerja sama dengan kampus yang ada di Ponorogo guna menjadikan mitra untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di Desa Jurug melalui program desa wisata. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah desa dan juga pihak kampus adalah dengan pembentukan lembaga yang bergerak di bidang Pariwisata (Jurug Kelana Dewi) dengan harapan lembaga tersebut bisa mengembangkan sector pariwisata yang ada di Desa Jurug.



Gambar 2. Pembentukan Jurug Kelana Dewi

Sumber : Website Wisata Jurug

2. Pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo terkait agro wisata dan juga digital marketing bertujuan untuk memasarkan kekayaan alam yang ada di Desa Jurug. Sehingga keaneragaman potensi alam yang ada di Desa Jurug bisa dikenal tidak hanya dari dalam Desa Jurug namun bisa sampai keluar Desa Jurug atau bahkan bisa menjadi salah satu lokasi Pariwisata yang dikenal sampai luar Kabupaten Ponorogo. Seiring dengan berkembangnya zaman tentunya Pemerintah Desa juga harus bisa mengemas potensi pariwisatanya sesuai dengan kebutuhan era ini. Mengingat bahwa pada zaman ini sudah memasuki era digital, tentunya Pemerintah Desa juga harus bisa mengembangkan pemasaran produk pariwisatanya melalui pemasaran digital.

3. Banyaknya potensi alam yang bisa menjadi daya tarik dari Desa Jurug. Potensi yang ada di Desa Jurug terbilang masih asri karena masih sangat terjaga dan masih alami. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, banyak potensi dari Desa Jurug yang belum dioptimalkan. Maka dari itu potensi ini bisa menjadi

keunggulan dari Desa Jurug dimana tidak semua tempat yang ada di Kabupaten Ponorogo memiliki keindahan alam seperti Desa Jurug. Dengan kondisi alam yang masih asri tentunya akan memanjakan mata setiap wisatawan yang berkunjung di Desa Jurug. Diiringi suasana pedesaan dan hamparan sawah yang berbentuk terasiring yang mempunyai udara yang masih sejuk serta rindangnya pohon di pinggiran jalan sudah pasti membuat wisatawan yang berkunjung akan merasa betah dengan suasana alam di Desa Jurug.

4. Pengembangan potensi Desa Wisata di Desa Jurug di proyeksikan untuk menstimulasi masyarakat Desa Jurug melalui pengembangan dan pemberdayaan melalui Program Desa Wisata. Adanya sebuah proyeksi melalui potensi Desa Wisata kedepan, Pemerintah Desa Jurug berharap masyarakatnya akan turut aktif ikut serta dalam pengembangan dan pemberdayaan Program desa Wisata di Desa Jurug. Dengan begitu, akan ada sinergi antara Pemerintah Desa Jurug dan semua lapisan masyarakat untuk mengembangkan Potensi Wisata yang ada di Desa Jurug.

B. Faktor penghambat:

1. Kurangnya peran pemerintah desa dalam memberikan sebuah tindak lanjut terhadap program yang sudah disosialisasikan. Dengan adanya tindak lanjut yang baik terhadap program yang disosialisasikan terhadap masyarakat tentu akan membuat masyarakat akan bisa ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Adanya sinergi antara pemerintah desa dan seluruh lapisan masyarakat guna menyamakan persepsi terkait program yang dijalankan tentu akan memaksimalkan kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat dalam mensukseskan berjalannya suatu Program. Hasil observasi peneliti, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Jurug masih kurang dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengembangkan dan mempekerdayakan masyarakat untuk menjadikan potensi yang ada di Desa Jurug dapat dioptimalkan. Dibuktikannya dengan masih banyaknya masyarakat yang apatis terhadap Program Desa Wisata Desa Jurug.

2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat Desa Jurug dimana masih adanya masyarakat yang tidak peduli dengan adanya program desa wisata di Desa Jurug. Sikap apatis terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di Desa Jurug tentunya akan menjadikan pengembangan Desa Wisata yang ada di Jurug akan menjadi lambat. Masyarakat harusnya bisa menyampaikan aspirasi dan pendapatnya untuk ikut

serta dalam pengembangan program desa wisata di Desa Jurug. Berdasarkan analisis di lapangan, masyarakat Desa Jurug cenderung pasrah dan takut untuk menyampaikan aspirasi atau usulan terkait program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Jurug. Selain kurang berpartisipasi dalam pengimplementasian Program masyarakat Desa Jurug masih mempunyai Budaya malas dibuktikan dengan masyarakat yang beralasan bahwa pekerjaan yang lebih penting daripada keikutsertaan dalam menjalankan Program Desa Wisata yang sebenarnya merupakan proyeksi dari pemerintah Desa Jurug untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui Program tersebut.

3. Kurangnya alokasi dana yang dianggarkan untuk pengembangan Program Desa Wisata. Pemerintah Desa Jurug masih belum bisa mengoptimalkan anggaran terkait pengembangan Desa Wisata dan pembangunan prasarana untuk Program Desa Wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jurug, Pemerintah Desa Jurug pada tahun 2021 untuk sementara ini mendapatkan dana hibah dari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 85.000.000 melalui Pokdarwis Desa Jurug. Kewenangan alokasi dana anggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan Desa Wisata merupakan faktor terpenting untuk merealisasikan dan mensukseskan Program Desa Wisata dan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

4. Adanya permasalahan limbah yang mengalir salah satu potensi alam di Jurug yaitu Air Terjun Pletuk. Limbah dari kotoran hewan dari kecamatan Pudak sangat berdampak bagi lokasi wisata air terjun pletuk. Air limbah dari kotoran hewan ternak dari Kecamatan Pudak sudah menjadi permasalahan serius bagi keberlangsungan pengembangan Desa Wisata di Desa Jurug. Kotoran limbah sapi yang di buang di sungai mengakibatkan air sungai yang mengalir Lokasi Wisata Air Terjun Pletuk menjadi tercemar. Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Air Limbah maka Pemerintah Desa harus mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dimana air dari Pudak merupakan satu-satunya air yang mengalir untuk sumber penghidupan di Desa Jurug. Dengan tercemarnya sungai yang mengalir air terjun Pletuk tentu membuat dampak yang serius untuk Air Terjun Pletuk. Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Pemerintah Desa Jurug sudah melakukan mediasi terkait pembuangan limbah kotoran sapi yang

dialirkan di sungai. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Jurug sampai sekarang ini Pemerintah Desa Jurug belum menemui titik terang terkait permasalahan tersebut.

5. Akses jalan dan sarana prasarana penunjang yang berada di Lokasi Wisata yang masih belum maksimal. Pembangunan terhadap akses dan sarana prasarana khususnya menuju potensi wisata Air Terjun Pletuk masih dalam tahap awal. Hal itu disebabkan karena beberapa tahun terakhir destinasi Wisata Air Terjun Pletuk tidak berfungsi sebagaimana tujuan dari pemerintah desa. Hasil analisis dan observasi peneliti, melihat di lapangan bahwa akses jalan dan sarana prasarana yang berada di Objek Wisata Jurug masih sangat kurang dalam pengelolaannya. Karena lokasi wisata tersebut lama terbengkalai, maka sarana dan prasarana yang ada di sekitar lokasi wisata menjadi tidak terurus dan rusak. Terbengkalainya sarana dan prasarana yang ada di Lokasi Wisata dikarenakan Wisata Air Terjun Pletuk sudah lama tidak beroperasi sebagai mana tujuan dari Program Desa Wisata di Desa Jurug. Dengan adanya permasalahan tersebut Pemerintah Desa harus membenahi dan mengembangkan Kembali tatalaksana yang berada di Lokasi Wisata tersebut.



Gambar 3. Gazebo yang sudah tidak terurus
Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

3. Peran Pemerintah Desa sebagai Pembina.

Kepala Desa Jurug yang mempunyai peran sebagai pembina dari masyarakat guna menjadikan masyarakatnya bermutu dan mandiri. Melalui pembinaan tersebut pemerintah desa berharap agar bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari masyarakatnya dan juga agar masyarakat Desa Jurug ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Jurug. Kegiatan

pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jurug secara garis besar mencakup beberapa bidang yaitu:

1. Bidang Ekonomi

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah desa berupaya agar masyarakatnya lebih bermutu dan bisa mandiri. Kerjasama yang dilakukan dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk memberikan penyuluhan pengolahan Ponggang untuk menjadi salah satu hasil kekayaan yang ada di Desa Jurug. Selain mengadakan penyuluhan pihak dari Kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga memberikan seminar terkait Agro Wisata terhadap Pemuda yang ada di Desa Jurug. Harapan dari Pemerintah Desa Jurug setelah dilakukan penyuluhan dan seminar akan menambah wawasan masyarakat Desa Jurug dan mengoptimalkan Kekayaan Alam yang ada di Desa Jurug.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Pokdarwis Desa Jurug, yang bersangkutan menyebutkan bahwa tidak hanya kekayaan Alam yang disuguhkan dalam program desa wisata di Desa Jurug namun juga berbagai olahan kuliner seperti Roti Gapit, roti Jahe, aneka keripik dan Aserehe sebagai Produk unggulannya. Melalui Dinas Pertanian, Ibu-ibu PKK Desa Jurug dibekali dengan pengetahuan terkait pengembangan Home Industri di Desa Jurug. Dengan adanya arahan dari Dinas Pertanian tentunya Pemerintah Desa berharap bahwa kakayaan kuliner yang dikelola langsung oleh Ibu-ibu PKK di Desa Jurug mampu memasarkan olahan kulinernya hingga di luar Kabupaten Ponorogo. Pembinaan yang dilakukan terkait dengan Home Industri yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakatnya melalui Ibu-ibu PKK dengan menjadikan produk Home Industri sebagai Lokal Branding Desa Jurug.

2. Bidang Keagamaan

Pembinaan di bidang keagamaan adalah dengan memunculkan kegiatan keagamaan yang ada di Desa Jurug. Seperti kegiatan-kegiatan religi yang menjadi budaya leluhur Desa Jurug, berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Jurug ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang mengarah pada bidang religi di Desa Jurug seperti: Wisata Religi Astono Gedung, Makam Kyai Blumbang Segoro, Makam Syeikh Subakir, makam Trimoleksono dll. Kemudian dengan adanya peninggalan sejarah tersebut Pemerintah Desa Jurug akan mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang ada di Desa Jurug sebagai salah satu program Desa Wisata di Bidang Religi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masyarakat Desa Jurug masih banyak yang belum mengetahui peninggalan sejarah yang ada di Desa Jurug. Pembinaan dari pemerintah desa pada bidang keagamaan masih sebatas pengenalan terkait dengan lokasi yang berpotensi sebagai wisata religi. Oleh karena itu dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah maka diharapkan masyarakat Desa Jurug bisa menanamkan nilai budaya, moral, adat istiadat, dan agama sebagai bentuk pelestarian dari peninggalan sejarah para leluhur. Pelestarian budaya tersebut bukan hanya sebagai pelestarian dalam bentuk fisik namun juga bertujuan agar masyarakat lebih mengenal sejarah historical yang ada di Desa Jurug kemudian bisa mengambil pelajaran positif yang sudah diajarkan oleh leluhur.

3. Bidang Kepemudaan

Pembinaan di bidang kepemudaan tentunya dengan pembentukan karang taruna Desa sebagai wadah untuk pemuda agar ikut serta dalam Program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Jurug. Salah satu kegiatan yang sudah berjalan adalah mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo terkait dengan desa wisata. Penyuluhan tersebut dilaksanakan 2 tahapan selama 1 bulan. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberi wawasan kepada pemuda terkait dengan desa wisata dan cara mengembangkannya. Selain itu Desa Jurug mempunyai Kesenian Jaranan Thik yang biasa diselenggarakan pada event-event kabupaten dan juga perayaan seperti Bersih Desa, dan acara-acara di Desa Jurug. Dengan adanya pembentukan karang taruna tersebut bertujuan agar Pemuda di Desa Jurug lebih aktif dalam mengikuti kegiatan yang ada di Desa Jurug dan menjadikan pemuda bisa menurkan pemikirannya untuk kemajuan Desa.

Peran pemuda sangatlah strategis dalam pelaksanaan program desa, dikarenakan Pemerintah desa memerlukan sebuah inovasi dan pemikiran cemerlang dari kalangan emuda. Selain dengan pemikirannya, kalangan pemuda menjadi garda paling depan yang mempunyai semangat membara dalam menciptakan perubahan social dalam Desa. Proses pengembangan potensi dari pemuda sendiri aktif dalam kegiatan desa merupakan salah satu cara untuk mengembangkan minat bakat dari pemuda itu sendiri.

Pentingnya peran dari kalangan Pemuda sebagai roda penggerak yang ada di Pemerintahan Desa, maka sudah menjadi Tugas dan wewenang dari Pemerintah Desa

untuk memberikan suatu wadah untuk pemuda agar bisa berproses dan menyuarkan semua aspirasi dari masyarakat melalui Organisasi Kepemudaan. Berdasarkan keterangan dari pemuda Desa Jurug terkait keeksistensianya Pemerintah Desa Jurug masih kurang dalam pemberdayaan terhadap Pemuda yang ada di Desa Jurug. Dilihat dari organisasi kepemudaan Desa Jurug seperti Karang Taruna yang untuk saat ini masih vakum. Dengan adanya wadah dari kepemudaan yang baik dan pembinaan dari Pemerintah yang bersifat memberi dukungan baik secara mental maupun fisik yang bagus maka akan menjadikan peran dari pemuda yang ada dalam Pemerintahan Desa lebih efektif dan bisa mengembangkan desa untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya luhur, lokal dan agama yang ada di Desa Jurug.

PENUTUP

Simpulan

Didasarkan pada hasil penelitian terkait Peran Pemerintah Desa Jurug dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakatnya melalui Program Desa Wisata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah Desa Jurug telah melakukan Perannya dengan baik sebagai Pelaksana Kebijakan. Dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait pengembangan Desa Wisata di Desa Jurug. Setelah beberapa tahun belakangan potensi wisata yang ada di Jurug terbengkalai. Namun masih perlu ada nya perbaikan di system birokrasinya. Pemerintah desa dan lembaga yang bersangkutan mengelola dan mengembangkan desa wisata harus terorganisir dengan baik sehingga dapat berjalan dengan efektif. Pada periode 2019-2025 Pemerintah Desa Jurug mulai memperhatikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata. Selain itu, kerja sama dengan kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk pembentukan lembaga yang bergerak di sektor pariwisata di Desa Jurug merupakan sebuah langkah awal untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakatnya melalui program desa wisata.

2. Peran Pemerintah Desa Jurug sebagai pelaksana Program merupakan ruh untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya dalam pelaksanaan program desa wisata. Peran pemerintah desa sangat dominan dalam mengait semua lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan

program yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian melalui data primer dan sekunder pemerintah desa masih belum bisa memberikan hasil yang signifikan dalam mengimplementasikan program desa wisata di Desa Jurug. Pemerintah Desa Jurug belum bisa mensinergikan seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Jurug. Dibuktikannya dengan adanya masyarakat yang tidak peduli terhadap Program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pengimplementasian Programnya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat program desa wisata tersebut. Adapun faktor pendukung nya adalah: Menjalini kerja sama dengan kampus yang ada di Ponorogo, banyak nya potensi wisata di Desa Jurug, proyeksi program desa wisata untuk menstimulasi masyarakatnya agar peduli terhadap perubahan lingkungan di Desa Jurug. Sedangkan faktor penghambat pengimplementasian Program tersebut adalah: kurangnya tindak lanjut sosialisasi Program, kurangnya partisipasi dan budaya malas masyarakat Desa Jurug, kurangnya pengoptimalan anggaran dana, dan adanya permasalahan limbah kotoran Hewan ternak, dan kurangnya penyediaan sarana dan prasarana di Lokasi Wisata Air Terjun Pletuk.

3. Peran Pemerintah Desa Jurug sebagai Pembina dalam bidang ekonomi sudah bisa dikategorikan berhasil dimana Desa Jurug sudah mempunyai Kerjasama dengan kampus di Ponorogo dan Dinas pertanian untuk mengelola potensi yang dimiliki Desa Jurug. Mulai dari pembentukan lembaga dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bergerak di Sektor pariwisata (Jurug Kelana Dewi) guna mengembangkan potensi alamnya untuk bisa menjadi sumber pendapatan bagi Desa Jurug. Seperti tanaman ponang yang beberapa tahun terakhir mayoritas penduduk Desa Jurug menanamnya. Dengan menggandeng kampus di Ponorogo Pemerintah Desa memberdayakan petaninya untuk mengembangkan olahan dari tanaman tersebut. Selain ponang Desa Jurug juga mempunyai produk olahan makanan dan minuman yang dikelola oleh Ibu-ibu PKK desa Jurug. Mulai dari olahan Keripik, roti jahe dan juga produk andalan yaitu aserehe. Dibidang kepemudaan dan keagamaan Pemerintah Desa Jurug belum berdampak signifikan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata. Dapat dilihat dari belum tersedianya wadah pemuda sebagai roda penggerak dari berjalannya program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Selain

itu wisata religi yang ada di Desa Jurug juga masih pada tahap perencanaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa rekomendasi penting antara lain:

1. Penguatan terhadap peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan yang mengacu pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya dalam program desa wisata. Dengan cara mengkoordinasikan semua lembaga yang berwenang secara sistematis dan memasukan program tersebut dalam rencana pengembangan desa sehingga mendapatkan alokasi anggaran.
2. Pemerintah desa perlu menindaklanjuti terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Pemerintah Desa Jurug dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Dinas Lingkungan Hidup) melakukan mediasi dengan Pemerintah Kecamatan Pudak terkait dengan pencemaran air limbah yang berdampak pada aliran sungai wisata Air Terjun Pletuk.
3. Pembentukan kembali organisasi kepemudaan di Desa Jurug sebagai langkah awal untuk menampung kreatifitas pemuda di Desa Jurug dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakatnya. Pemuda merupakan roda penggerak sekaligus salah satu faktor penting dalam pembangunan Desa Wisata. Melihat bahwa Desa Jurug membutuhkan SDM yang berkompeten dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya melalui Program Desa Wisata yang dijalankan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing skripsi.
3. Badrudin Kurniawan, S.AP., AP., selaku Dosen Penguji.
4. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA., selaku Dosen Penguji.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun materil kepada peneliti sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam, Balyan Saeful, Deden Sumpena, Ali Aziz, Pemerintah Desa, and Desa Wisata. 2018. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata." 3(September):43–64.
- Ardyansyah, Dhani. 2010. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik." *Jurnal MEDTEK* 2(1):14.
- Oroh, Gleydis Susanti. 2014. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa." 1:1–26.
- Walidaya. 2013. "Implementasi Undang-Undang Nompur 6 Tahun 2014 Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa Di Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab. Muara Jambi." *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture* 53(9):1689–99.
- Karbulah, Yaya, and Aliyudin. 2018. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani." *Jurnal Pengemangan Masyarakat Islam* 3(1):90–113.
- Khairuzzaman, M. Qadafi. 2016. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)." 4(1):64–75.
- Kurnia, Devi. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Vol. 4.
- Laloma, Julien Humapi Martha Ogotan Alden. 2012. "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud." *Pemberdayaan Masyarakat* 66:37–39.
- Masitah, Itah. 2019. "Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 53(9):1689–99.
- Nugroho, Bonifasius Efsiko, and Galih Pradana. 2021. "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Progam Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya." 155–66.
- Nursalam, 2016, metode penelitian, and A. .. Fallis. 2013. "Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Putra, Chandra Kusuma dkk. 2012. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." 1(6):1203–12.
- Pratiwi, Hesty. 2017. "Skripsi Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri Di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang." *Pemberdayaan Masyarakat (Desa Wisata)*:1–1144.
- Madina, Risa Iman dkk, 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Regulasi Daerah Terkait Penerimaan Pajak Reklame (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)." 6(2):1–10.
- Rois, Syamsudin. 2019. "Pengembangan Wisata Air Terjun Pletuk Desa Berbasis Ekowisata Kultural Mencapai 251 Juta Orang . Hal Ini Menandakan Bahwa Jumlah Orang Indonesia Yang." (November):1134–45. doi: 10.30998/simponi.v0i0.526.
- Sabtimarlia. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Desa Wisata Sambi Di Dusun Ssambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Sahyana, Yana. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 157–81. doi: 10.33701/jt.v8i2.618.
- Shalfiah, Ramandita. 2013. "Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program- Program Pemerintah Kota Bontang." 1(3):975–84.
- Sugiri, Lasiman. 2012. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Publika* 2(1):56–65.
- Tukiman, Tukiman, Ertien Rining N, and Andre Yusuf Trisna. 2019. "Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Dalam Usaha Pembuatan Abon Dengan Bahan Dasar Dari Jantung Pisang Di Desa Dompnyong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 4(1):38. doi: 10.26740/jpsi.v4n1.p38-47.
- Ulumiyah, I. 2013. "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1(5):890–99.